



Analisis Keberhasilan Kabupaten Kepulauan Meranti Pasca Pemekaran Daerah di Bidang Ekonomi dan Pelayanan Publik

Oges Susfita Putri ¹, Nathasia Angelina Saragi ², Sella Oktapatika ³,
Calvin Antony ⁴, Aditya Saputra ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: ogessusfita08@gmail.com angelinanathasia12@gmail.com sellaoktapatika@gmail.com
calvinantony16@gmail.com adityastra8@gmail.com

Abstract, *The success of Meranti Islands Regency after the expansion of Bengkalis Regency which occurred on December 19 2008, with a focus on the economic sector and public services. Even though there are several indicators of better economic performance compared to the parent region, the overall economic growth of Meranti Islands Regency is still lagging behind. On the public service side, even though it shows more positive results, there are several indicators that are still lower than Bengkalis Regency. This research uses literature studies to identify the challenges and performance of the Meranti Islands Regency, including the problem of fiscal dependence and suboptimal regional financial management. Public services in this area have not been effective due to inefficient use of funds, lack of public service energy, and service utilization that has not been maximized. Despite the accessibility of public services.*

Keywords: *Meranti Islands Regency, Regional Expansion, Economy, Public Services*

Abstrak, keberhasilan Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang terjadi pada 19 Desember 2008, dengan fokus pada bidang ekonomi dan pelayanan publik. Meskipun terdapat beberapa indikator kinerja perekonomian yang lebih baik dibandingkan daerah induknya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan masih tertinggal. Di sisi pelayanan publik, meskipun menunjukkan hasil yang lebih positif, terdapat beberapa indikator yang masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengidentifikasi tantangan dan kinerja Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk masalah ketergantungan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Pelayanan publik di daerah ini belum berjalan efektif akibat penggunaan dana yang tidak efisien, kurangnya energi layanan publik, dan pemanfaatan layanan yang belum maksimal. Meskipun aksesibilitas layanan publik

Kata kunci: Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemekaran daerah, Ekonomi, Pelayanan Publik

1. PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai pengembangan wilayah serta berbagai kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran, meliputi aspek ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor-faktor lain yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, aturan lebih rinci tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007. Peraturan ini menjabarkan prosedur pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Tujuan utama pemekaran wilayah mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pelayanan publik, percepatan proses demokrasi, pengembangan ekonomi daerah, pengelolaan potensi lokal, dan menjaga keamanan serta ketertiban. Selain itu, pemekaran juga bertujuan untuk memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.

Kabupaten Bengkalis mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Karena terbatasnya pembangunan dan rendahnya kualitas pelayanan publik, Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk membentuk daerah otonom baru dengan bergabung pada tahun 2009 (Dpmtsp.go.id). Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memiliki luas 3.714,20 km² dan terdiri dari sembilan kecamatan (Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu), memerlukan perhatian dan layanan khusus dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Masalah kurangnya fasilitas pelayanan publik serta minimnya perhatian dari pemerintah daerah menjadi salah satu alasan kuat bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memisahkan diri dan membentuk daerah otonom baru (Hakim, 2017).

Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2009, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pemanfaatan potensi daerah (Putri, 2015). Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang telah mengalami pemekaran wilayah. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung oleh lokasi geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah, ketimpangan pembangunan di wilayah ini tetap signifikan, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah (Tiffani, 2013).

Secara umum, perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum mampu bersaing dengan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induknya. Dengan kata lain, pemekaran wilayah belum memberikan dampak positif yang signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meskipun beberapa indikator seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menunjukkan perkembangan tertentu. Per kapita mampu tumbuh lebih baik dibandingkan daerah induknya. Secara umum, Pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah bisa bersaing dengan produktivitas wilayah induknya yaitu Kabupaten Bengkalis, dengan kata lain dampak pemekaran menunjukkan output yang baik dalam meningkatkan efisiensi layanan masyarakat lokal meskipun jika kita mencermati Beberapa tolok ukur kinerja layanan publik, seperti keberadaan tenaga Kesehatan serta persentase kondisi jalan. salah satu Yang berkembang lebih lambat dibandingkan wilayah asalnya (Hakim, 2017).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemekaran Daerah

Kepentingan pemekaran daerah digunakan sebagai salah satu alasan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. (Lay dan Santoso, 2006: 11-13 dalam Ciptawaty, 2019). Marbun menegaskan bahwa tujuan dibentuknya daerah sebagai subsistem adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah, di sisi lain, merupakan semacam kematangan dan harapan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya. Pemekaran daerah diharapkan mampu mengatasi ketertinggalan karena sulitnya akses terhadap pelayanan pemerintah, sehingga perlu memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, demikian klaim Dede Mariana dan Caroline Paskarina. (Farizi, 2022).

Ekonomi

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga (Oppier, 2021), Ekonomi, menurut Abraham Maslow, adalah salah satu disiplin ilmu yang berusaha menjawab tuntutan mendasar dari keberadaan manusia dengan mengembangkan semua sumber daya keuangan yang tersedia sesuai dengan teori dan prinsip-prinsip tertentu dalam suatu sistem yang sehat secara ekonomi. Sedangkan Paul A. Samuelson mendefinisikan ekonomi sebagai proses di mana individu dan komunitasnya memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang dan mendistribusikannya untuk konsumsi bersama. Sistem ekonomi Indonesia dirancang untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang adil serta merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Marlinah, 2017).

Pelayanan Publik

Pelayanan publik, menurut Sinambela (dalam Lenak, dkk. 2021), adalah semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk sejumlah individu yang memberikan manfaat dalam suatu komunitas, serta memberikan kepuasan meskipun tidak selalu menghasilkan produk fisik. Dengan demikian, pelayanan publik adalah kegiatan pemerintah yang mencakup jasa dan barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemekaran di Kepulauan Meranti bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara maksimal. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemekaran ini dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk memperoleh pemahaman mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam proses pemekaran Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, artikel ini mencakup berbagai sumber data dan referensi yang relevan. Metode pengumpulan data digunakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk tujuan selain menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, yang berasal dari kajian dan penelitian terdahulu. Selain itu, data juga diperoleh melalui artikel-artikel terkait yang relevan, khususnya mengenai pemekaran daerah yang membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data yang diterapkan berupa riset untuk mendapatkan informasi terkait analisis mengenai keberhasilan Kabupaten Kepulauan Meranti setelah pemekaran, terutama dalam bidang ekonomi dan pelayanan publik.

4. HASIL DAN PEMBASAN

Sejarah Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Bengkalis

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, yang resmi berdiri pada 19 Desember 2008. Dasar hukum pembentukan Kabupaten Meranti diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2009, yang disahkan pada 16 Januari 2009. Proses pemekaran Kabupaten Meranti telah diperjuangkan oleh masyarakat sejak tahun 1957, dengan upaya yang terus dilakukan pada dekade 1970-an, 1990-an, hingga 2008. Pada masa itu, wilayah Meranti masih menjadi satu-satunya kawedanan di Provinsi Riau yang belum dimekarkan. Berkat perjuangan gigih para tokoh masyarakat, pada 25 Juli 2005, dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM), yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan agar Meranti dapat memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, sejumlah keputusan dan surat dukungan resmi diterbitkan. Di antaranya, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 pada 17 Juni 1999, yang memberikan persetujuan terhadap pemekaran Kabupaten Bengkalis, serta Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 pada tanggal yang sama yang mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, dukungan juga datang dari Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 pada 11 Juli 2008, diikuti oleh Surat Gubernur Riau Nomor 100/PH/21.16.a tertanggal 9 Juni 2008, dan Surat Gubernur Riau Nomor 100/PH/58.24 pada 8 September 2008. Selain itu, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 pada 19

September 2008 dan Nomor 100/PH/58.32 tertanggal 18 Desember 2008 semakin memperkuat dukungan dari pemerintah provinsi untuk pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah melalui proses kajian kelayakan yang mendalam, pemerintah secara resmi menetapkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru di Provinsi Riau pada 19 Desember 2008 (Setiawan, 2018).

Kepulauan Meranti Pasca Pemekaran Daerah di Bidang Ekonomi

Setelah pemekaran, Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan ekonominya. Terdapat dua masalah utama yang mengemuka dalam kinerja perekonomian daerah, yaitu ketidakseimbangan distribusi potensi ekonomi dan tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam hal keuangan daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terbentuk melalui kebijakan pemekaran oleh Pemerintah Daerah, menunjukkan kinerja yang jauh di bawah Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induknya. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan, antara lain ketergantungan fiskal yang tinggi, alokasi belanja modal yang besar, tetapi tidak diimbangi dengan optimalisasi pendapatan dan kontribusi ekonomi yang memadai, serta rendahnya porsi anggaran untuk belanja modal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Semua faktor ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan daerah Kepulauan Meranti belum berhasil secara efektif mendorong kegiatan ekonomi, baik yang bersifat konsumtif maupun investasi (Hakim, 2017).

Kinerja pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai belum optimal akibat beberapa permasalahan, seperti penggunaan dana yang kurang efektif, lemahnya kapasitas layanan publik, dan rendahnya pemanfaatan pelayanan publik. Dari sudut pandang penyelenggaraan layanan pemerintah, permasalahan yang muncul meliputi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan penyediaan layanan, rendahnya kualitas peralatan, serta pegawai pemerintah yang bekerja secara tidak maksimal. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induk relatif stabil dan mengalami peningkatan. Meskipun daerah pemekaran telah berupaya memperbaiki kinerja ekonomi, proses transisi yang membutuhkan waktu membuat potensi ekonomi belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Sementara itu, dari segi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum mampu menyamai perkembangan yang dicapai oleh Kabupaten Bengkalis.

Dari sisi ekonomi, kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Kabupaten Bengkalis) disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan sumber

daya alam dan sumber daya manusia, serta belum memadainya kemampuan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi publik. Dalam aspek keuangan daerah, disimpulkan bahwa anggaran pemerintah daerah Kepulauan Meranti kurang optimal dalam mendukung perekonomian dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis (Tielung, 2012).

Faktor Pendorong dan Penghambat

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sumber daya dari sektor perkebunan dan pertanian yang mayoritas masih dikelola oleh masyarakat, bukan oleh perusahaan besar. Selain itu, wilayah ini juga memiliki berbagai sumber daya alam lainnya. Karena komoditas unggulan daerah ini sebagian besar berada di bawah kendali masyarakat, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor perkebunan dan pertanian, asalkan kebijakan yang dirancang dapat direalisasikan dengan strategi yang tepat, bukan sekadar wacana. Terletak di wilayah geografis yang strategis, Kepulauan Meranti memiliki keunggulan dalam produksi perkebunan dan pertanian yang tidak hanya dibutuhkan oleh daerah sekitarnya, tetapi juga hingga ke Pulau Jawa, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, selain berbagai potensi ekonomi lain yang masih dapat dikembangkan (Redaktu, 2020).

Pemekaran daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi wilayah terkait yang mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah induknya disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan perikanan, sehingga perekonomian menjadi rentan terhadap perubahan harga dan kondisi iklim (Hakim, 2017). Sektor pertanian yang masih dominan serta kurang berkembangnya sektor pengolahan menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, persentase penduduk miskin di Daerah Otonomi Baru (DOB) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asalnya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki beberapa potensi unggulan, seperti komoditas sagu yang telah dikenal sebagai salah satu sumber pangan alternatif dunia, bahkan telah menjadi varietas sagu nasional. Sagu ini diolah menjadi tepung kering yang disuplai dan diekspor ke pasar domestik maupun internasional, termasuk ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang. Kabupaten Kepulauan Meranti juga memproduksi kopi liberika Meranti, jenis kopi khas dari Pulau Rangsang, yang banyak ditampung oleh pedagang dari Malaysia (Sari, 2022).

Dampak Pemekaran Terhadap Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB per kapita, dan kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap PDRB Provinsi sebenarnya masih lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis. Namun, sejak memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis, peningkatan indikator-indikator tersebut di Kepulauan Meranti lebih signifikan dibandingkan Bengkalis. Begitu juga dalam pengurangan kemiskinan, pengurangan kemiskinan di kabupaten kepulauan meranti lebih baik pada kabupaten bengkalis. Berdasarkan berbagai poin yang telah disampaikan sebelumnya, pemekaran memang perlu dilakukan karena memberikan dampak positif terhadap perkembangan wilayah di dua kabupaten. Dampak positif ini terlihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, Menurunnya kesenjangan pembangunan antarwilayah atau tercapainya konvergensi, serta meningkatnya aglomerasi di Kabupaten Bengkalis (Tiffani, 2013).

Kepulauan Meranti Pasca Pemekaran Daerah di Bidang Pelayanan Publik

Pasca pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami perubahan signifikan dalam pelayanan publik, khususnya dalam administrasi kependudukan. Sebelum pemekaran, semua layanan publik berpusat di Kabupaten Bengkalis, yang menyebabkan kendala akses bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Akses yang terbatas dengan jarak tempuh yang jauh, ditambah dengan minimnya infrastruktur dan hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut, membuat sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan jasa perantara untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Setelah berstatus sebagai daerah otonom, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun infrastruktur yang memadai dan mempersingkat rentang kendali birokrasi. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, kinerja pelayanan administrasi kependudukan, terutama layanan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran, masih belum optimal.

Pelayanan yang diberikan masih jauh dari memuaskan, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memperoleh layanan yang memadai. Penerapan pelayanan yang baik sulit tercapai karena beberapa kendala, seperti sebagian masyarakat yang belum dapat mengakses layanan dengan baik, lamanya waktu pengurusan dokumen (terutama dalam penerbitan KTP-el) akibat kekurangan blanko KTP-el, masalah koneksi internet dan pasokan listrik, serta ketiadaan sertifikasi. Selain itu, fasilitas yang ada belum cukup memadai, dan penyedia layanan masih belum profesional. Meski demikian, dari segi harga dan produk, pelayanan telah mengalami perbaikan karena biaya yang sangat terjangkau dan produk layanan yang lebih lengkap. Di sisi lain, dalam hal biaya dan produk, pelayanan kini lebih

menguntungkan karena tarif layanan jauh lebih rendah dan produk lebih fleksibel. Dalam konteks pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti:

- 1) Fasilitas dan Infrastruktur yang terbatas
- 2) Ketidacukupan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan dokumen untuk kemudahan pelayanan.
- 4) Struktur sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di lokasi terpencil cenderung menghasilkan dokumen kependudukan secara kolektif, sehingga mengakibatkan penyelenggara layanan masyarakat membebani biaya yang tinggi. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, seperti peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan, kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya kompetensi pegawai menjadi tantangan utama. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, pelayanan publik di Kepulauan Meranti belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Faktor Pendorong

Ada beberapa faktor pendorong pasca pemekaran di bidang pelayanan publik diantaranya:

1. Aspirasi Masyarakat

Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang kuat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Masyarakat Kepulauan Meranti telah lama menginginkan pemekaran untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Keinginan ini mendorong pemerintah untuk lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Otonomi Daerah

Pemekaran daerah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk merancang program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan.

3. Peningkatan Infrastruktur

Setelah pemekaran, ada dorongan untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Pembangunan jalan, gedung pelayanan, dan fasilitas umum lainnya menjadi prioritas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan. Infrastruktur yang baik juga berkontribusi pada efisiensi dalam proses

pelayanan.

4. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pemekaran dan peningkatan pelayanan publik juga menjadi pendorong. Adanya regulasi dan program-program yang memfasilitasi pengembangan daerah otonom memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

5. Inovasi dalam Pelayanan

Dorongan untuk berinovasi dalam pelayanan publik juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah berusaha untuk menerapkan teknologi baru dan metode pelayanan yang lebih efisien, seperti sistem online untuk pengurusan dokumen. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelayanan publik pasca pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana merupakan salah satu kendala utama adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Infrastruktur yang tidak cukup, seperti gedung pelayanan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya, menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, proses pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien.
2. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kompetensi petugas yang memberikan layanan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat masalah terkait kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak optimal, dan masyarakat sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi atau bantuan yang mereka butuhkan.
3. Tidak cukupnya pengetahuan masyarakat tentang urgensi administrasi kependudukan dan kelengkapan berkas juga menjadi penghambat. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur yang harus diikuti atau dokumen yang diperlukan, sehingga menghambat proses pengurusan dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.
4. Kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam dan seringkali terpisah oleh jarak geografis juga menjadi faktor penghambat. Banyak komunitas yang tinggal di pulau-pulau kecil, oleh karena itu sulit untuk mengakses layanan publik secara kolektif. Hal ini sering kali memaksa mereka untuk menggunakan jasa calo, yang dapat menambah biaya dan memperlambat proses.
5. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik juga

menjadi kendala. Tanpa dukungan finansial yang cukup, pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan perbaikan infrastruktur, pelatihan petugas, dan pengembangan program-program pelayanan yang lebih baik.

Dampak Pemekaran Terhadap Pelayanan Publik

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti telah meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Sebelumnya, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke Kabupaten Bengkalis untuk mengurus dokumen administrasi seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Dengan adanya kabupaten baru, layanan ini kini dapat diakses lebih dekat, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan. Pemekaran daerah sering kali diikuti dengan upaya pembangunan infrastruktur. Di Kepulauan Meranti, ada upaya untuk memperbaiki dan membangun fasilitas publik yang mendukung pelayanan, seperti gedung pelayanan dan akses transportasi. Namun, tantangan geografis yang dihadapi, seperti pulau-pulau yang terpisah, membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih kompleks dan memerlukan perhatian khusus.

5. KESIMPULAN

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis memberikan dampak yang signifikan baik di bidang ekonomi maupun pelayanan publik. Meskipun terdapat tantangan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti ketidakmerataan distribusi potensi ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan, ada indikasi bahwa pemekaran memberikan peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Di sektor pelayanan publik, pemekaran memungkinkan akses yang lebih dekat bagi masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah fasilitas dan akses, kualitas pelayanan masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal sarana, prasarana, dan kompetensi petugas. Secara keseluruhan, pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan potensi positif, tetapi memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas layanan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

6. DAFTAR REFENSI

Al-Farizi, R. A. (2022). *Konflik tanah Alun-Alun Indihiang antara ahli waris dengan pemerintah Kota Tasikmalaya pasca perubahan status Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang tahun 2009* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Ciptawaty, U. (2019). Pola pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru DOB berdasarkan

tipologi kelas. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 229-241.

- Hakim, A., Hamidi, W., & Tampubolon, D. (2017). Analisis dampak pemekaran daerah ditinjau dari aspek percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Jumitri, J. (2018). Efektivitas pelayanan program listrik pintar (prabayar) PT. PLN (PERSERO) Ranting Duri (Studi Desa Serai Wangi) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas pelayanan publik melalui penerapan electronic government di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Governance*, 1(1).
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 258-265.
- Mediacenter. (2020). Kepulauan Meranti berpotensi jadi poros ekonomi maritim wilayah timur Sumatera. Diakses pada 30 November 2024 dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/51475/kepulauan-meranti-berpotensi-jadi-poros->
- Oppier, H., Yudawisastra, H. G., Hanim, W., Solikin, A., Wahyunawati, S., Effendi, N. I., & Junaedi, I. W. R. (2021). *Ekonomi mikro*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Putri, W. D. (2015). Dampak pemekaran daerah terhadap pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(1), 111-120.
- Safri, H. (2018). *Pengantar ilmu ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Sari, P. F. (2022). Pengembangan infrastruktur pelabuhan penumpang Tanjung Harapan dalam mendukung pembangunan di Selatpanjang (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri).
- Setiawan, H. (2018). Pengaruh penempatan kerja terhadap prestasi kerja pegawai bagian keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Tielung, L. I. E. K. E. (2012). Evaluasi pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Tiffani, M. K. (2013). Analisis komparasi konvergensi, aglomerasi, dan kinerja ekonomi daerah pada daerah pemekaran (Studi kasus pemekaran Kabupaten Bengkalis-Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).